

ABSTRAKSI

Reformasi birokrasi berbasis teknologi menjadi sebuah langkah strategis dalam optimalisasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik pada sektor pemerintahan. Penelitian ini membahas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa. Fokus utama dari penelitian ini adalah menilai efektivitas kebijakan reformasi birokrasi yang mendukung optimalisasi dan peningkatan efisiensi layanan publik, khususnya pada sektor pelayanan izin dan penanaman modal. Metode yang penulis gunakan di sini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa, termasuk wawancara dan analisis dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui sistem OSS (Online Single Submission) telah mempercepat prosedur pemberian layanan perizinan dan meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik. Namun, masih ada beberapa hambatan dari pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan adaptasi teknologi di tingkat lokal. Secara menyeluruh hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi di DPMTSP Kabupaten Sumbawa memiliki dampak positif dalam peningkatan kualitas layanan publik dan daya saing iklim investasi di daerah.

(Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, DPMTSP, Layanan Publik)

ABSTRACT

Technology-based bureaucratic reform represents a strategic step towards optimizing and enhancing the efficiency of public services within the government sector. This study examines the implementation of technology-based bureaucratic reform in the Investment and One-Stop Integrated Service Office of Sumbawa Regency. The primary focus of this research is to assess the effectiveness of bureaucratic reform policies that support the optimization and improvement of public service efficiency, particularly in the areas of licensing and investment facilitation. The methodology employed in this study is descriptive qualitative, utilizing a case study approach at the Investment and One-Stop Integrated Service Office of Sumbawa Regency, which includes interviews and document analysis. The findings indicate that the application of information and communication technology through the OSS (Online Single Submission) system has expedited the licensing service procedures and enhanced information transparency to the public. However, there are still several challenges in its implementation, such as limitations in human resources and technology adaptation at the local level. Overall, the results of the study demonstrate that technology-based bureaucratic reform at the DPMTSP of Sumbawa Regency has a positive impact on improving the quality of public services and the competitiveness of the investment climate in the region.

(Key word: Bureaucratic Reform, DPMTSP, Public Service)